

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H., Kenamon, M., & Anggraini, Y. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Oku Selatan Tahun Anggaran 2013-2017. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita*.
- Brown, KW 1993, 'The 10 point test of financial condition: Toward an easy to use assesment tool for smaller cities', *Government Financial Review*, vol 9, pp.21-26
- Brown, KW 1996, 'Trends in key retions using the GFOA financial indicators databeses 1989-1993', *Government Financial Review*, vol 12, pp.30-34
- Dewi, (2016). Desain dan Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa dan Bali Tahun 2013 dan 2014.
- Halim, (2014). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Mohammad. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan mengenai struktur APBD
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. *Accountability*.
- Ritonga, I. T. (2014). *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah. ISBN: 978-602-229-363-7.
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*.
- UU Nomor 29 tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*.